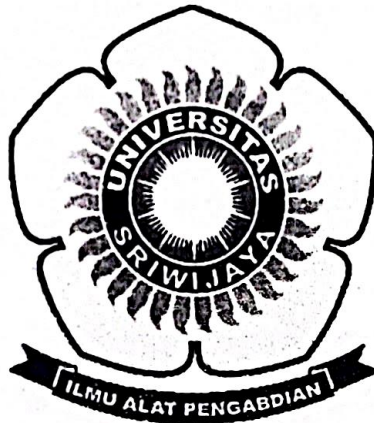


**FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH PADA BELANJA MODAL
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2012-2022**



ASLI
JUR. EK. PEMBANGUNAN 19-1-2024
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

Skripsi Oleh:

DELLA OKTARIN

01021382025131

EKONOMI PEMBANGUNAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2023

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH PADA BELANJA MODAL KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2012-2022

Disusun oleh:

Nama : Della Oktarin
NIM : 01021382025131
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Ekonomi Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian Skripsi.

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING



Tanggal: 18 Desember 2023

Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si.
NIP. 196007101987031003

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH PADA BELANJA MODAL KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2012-2022

Disetujui Oleh :

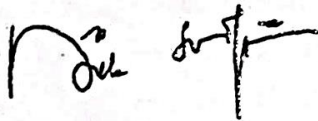
Nama : Della Oktarin
NIM : 01021382025131
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Ekonomi Keuangan Daerah

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 29 Desember 2023 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif

Palembang, 15 Januari 2024

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si.
NIP. 196007101987031003

Dosen Penguji



Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si.
NIP. 196903142014092001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

ASLI

JUR. EK. PEMBANGUNAN 13-1-2024
FAKULTAS EKONOMI UMSRI



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si.
NIP. 197304062010121001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Della Oktarin
NIM : 01021382025131
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Ekonomi Keuangan Daerah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012-2022

Pembimbing : Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si.

Tanggal Ujian : 29 Desember 2023

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak saya sebutkan sumbernya. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Palembang, 15 Januari 2024

Pembuat Pernyataan,



Della Oktarin

NIM.01021382025131

ASLI
JUR. EK. PEMBANGUNAN 19.1.2024
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”

(QS. Al-Insyirah, 94: 6-8)

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar bin Khattab)

Nikmati apa yang kamu jalani sekarang, karena pohon yang besar untuk tumbuh butuh proses yang panjang.

-Live with purpose-

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ♣ Allah SWT, sebagai rasa dan bentuk syukur atas ilmu dan berkah
- ♣ Orang Tuaku Bapak Syofian dan Ibu Kartika Dayani
- ♣ Saudara-saudara dan keluargaku
- ♣ Teman-teman dan sahabat-sahabatku
- ♣ Almamater

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2022”** dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya.

Dalam kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan motivasi dalam proses perjalanan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan belum sempurna. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan masukan, kritik, dan saran dari pembaca yang dapat membantu dalam pengembangan penelitian ini lebih lanjut dan berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangsih yang bermanfaat bagi dunia akademik, praktisi, dan masyarakat umum dalam bidang ekonomi dan dapat menjadi inspirasi serta menjadi kontribusi yang berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Palembang, 29 Desember 2023



Della Oktarin

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan kerendahan hati, Penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih atas bimbingan, bantuan, dan dukungan yang tulus dan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Adam S.E., M.E. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mukhlis, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Sukanto, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktu, arahan, bimbingan, dan masukan yang berharga sepanjang penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran kepada Penulis.
6. Ibu Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si. selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah menyempatkan waktu, nasihat, dan memberikan bimbingan serta saran dengan baik kepada Penulis.
7. Ibu Prof. Dr. Bernadette Robiani, M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah memberikan bimbingan, nasihat, dan motivasi dari awal semester perkuliahan ini.
8. Dosen-dosen dari Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi,

Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman yang berharga kepada Penulis selama masa perkuliahan. Serta Staf Administrasi Akademik Prodi Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan arahan serta bantuan dalam proses perkuliahan.

9. Cinta pertama dan panutanku Bapak Syofian dan pintu surgaku Ibu Kartika Dayani yang selalu memberikan doa, dukungan, cinta kasih, dan semangat dalam setiap langkah proses pendidikan ini. Selanjutnya, kakak-kakakku yang telah memberikan doa, dorongan, dan masukan terhadap penulisan skripsi, serta keponakan-keponakanku dan sepupu-sepupuku yang telah memberikan semangat dan motivasi. Terima kasih juga kepada keluarga besar Kgs. H. Entik yang telah memberikan doa dan dukungan dalam proses memperoleh gelar sarjana ini.
10. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Angkatan 2020, anggota grup Cemara, GG *Squad*, Keluarga Opah, Derta, BCD Group, sahabatku M. Dimas Farizqi, serta pihak lain yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan moral, semangat, kontribusi, dan kerja sama selama sepanjang proses penulisan skripsi ini. Serta tak lupa terima kasih untuk Jodoh Penulis kelak sebagai salah satu alasan Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH PADA BELANJA MODAL KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2012-2022

Oleh:
Della Oktarin; Didik Susetyo

Belanja modal memiliki peranan penting dalam memajukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah melalui pengadaan, pembelian, atau pembangunan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal pada 17 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2012-2022. Jenis data penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan data sekunder yang bersumber dari instansi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Luas Wilayah masing-masing berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan secara serempak Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Luas Wilayah juga berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dengan pengaruh koefisien sebesar 0,980826 atau sebesar 98 persen.

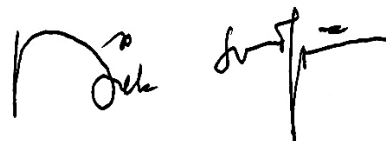
Kata Kunci: Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Luas Wilayah

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si.
NIP. 197304062010121001

Ketua,



Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si.
NIP. 196007101987031003

ABSTRACT

FACTORS AFFECTING CAPITAL EXPENDITURE IN DISTRICTS/CITIES OF SOUTH SUMATRA PROVINCE IN 2012-2022

By:
Della Oktarin; Didik Susetyo

Capital expenditure has an important role in advancing the economic growth of a region through the procurement, purchase, or construction of fixed assets and other assets that contribute significantly to economic development. This study aims to analyze the effect of Regional Original Revenue, General Allocation Fund, and Area on Capital Expenditure in 17 Districts/Cities of South Sumatra Province for the 2012-2022 period. This type of research data is quantitative research and secondary data sourced from the Directorate General of Financial Balance (DJPK) and the Central Statistics Agency (BPS). The analysis technique used is regression analysis of panel data using Fixed Effect Model (FEM). The results of this study show that partially Regional Original Revenue, General Allocation Fund, and Area respectively have a positive and significant effect, while simultaneously Regional Original Revenue, General Allocation Fund, and Area also have a significant effect on Capital Expenditure in Districts/Cities of South Sumatra Province with a coefficient influence of 0.980826 or 98 percent.

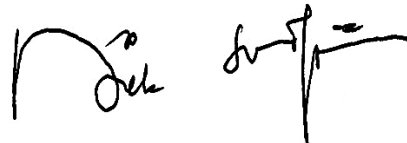
Keywords: Capital Expenditure, Local Original Revenue, General Allocation Fund, Area

Aproved,
Head of Development Economics Programs



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si.
NIP. 197304062010121001

Chairman,



Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si.
NIP. 196007101987031003

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Kami Dosen Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa abstraksi skripsi dari mahasiswa:

Nama : Della Oktarin
NIM : 01021382025131
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Mata Kuliah : Ekonomi Keuangan Daerah
Judul Skripsi : Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Belanja Modal di
Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2022

Telah kami periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*nya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

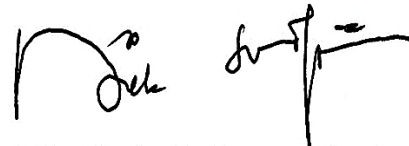
Palembang, 15 Januari 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dosen Pembimbing,



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si.
NIP. 197304062010121001



Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si.
NIP. 196007101987031003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP		
	Nama	Della Oktarin
	NIM	01021382025131
	Jenis Kelamin	Perempuan
	Tempat/Tanggal Lahir	Palembang, 14 Oktober 2022
	Agama	Islam
	Alamat	Jalan Sultan Moh. Mansyur No.334 A RT.04 RW.02 Bukit Lama, Ilir Barat I, Palembang
	Nomor Handphone	0895637148613
PENDIDIKAN FORMAL		
2008 - 2014	SD Negeri 09 Palembang	
2014 - 2017	SMP Negeri 43 Palembang	
2017 - 2020	SMA Negeri 1 Palembang	
2020 - 2024	S1-Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya	
PENGALAMAN ORGANISASI		
2023-2024	Bendahara Umum I IMEPA FE UNSRI	
2022-2023	Staff Ahli Bendahara Umum IMEPA FE UNSRI	
2021-2022	Staff Muda Media dan Informasi IMEPA FE UNSRI	
PENGALAMAN MAGANG/KERJA		
2023	Peserta Magang Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Seberang Ulu - Kementerian Keuangan (2 bulan)	

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK	xi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Landasan Teori dan Konseptual	15
2.1.1 Teori Pengeluaran Pemerintah (<i>Government Expenditure</i>).....	15
2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	20
2.1.3 Belanja Modal	22
2.1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	24
2.1.5 Dana Alokasi Umum	29
2.1.6 Luas Wilayah.....	32
2.2 Penelitian Terdahulu	34
2.3 Kerangka Konseptual.....	36

2.4	Hipotesis Penelitian	40
BAB III METODE PENELITIAN		42
3.1	Ruang Lingkup Penelitian	42
3.2	Jenis dan Sumber Data.....	42
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.4	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	43
3.5	Teknik Analisis Data	45
3.5.1	Metode Analisis Regresi Data Panel.....	45
3.5.2	Pengujian Asumsi-Asumsi Model Regresi	47
3.5.3	Pengujian Hipotesis.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		51
4.1	Teknik Gambaran Umum Objek Penelitian.....	51
4.1.1	Kondisi Geografis	51
4.1.2	Kondisi Demografi.....	53
4.1.3	Kondisi Perekonomian Wilayah	55
4.2	Gambaran Umum Variabel Penelitian.....	56
4.2.1	Belanja Modal	56
4.2.2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	59
4.2.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	62
4.2.4	Luas Wilayah	66
4.3	Hasil Penelitian	68
4.3.1	Analisis Statistik Deskriptif	68
4.3.2	Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel	70
4.3.3	Pengujian Asumsi Klasik	73
4.3.4	Hasil Analisis Regresi Data Panel	76
4.3.5	Hasil Uji Hipotesis	78
4.4	Interpretasi Hasil Penelitian.....	80
4.4.1	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal	80
4.4.2	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal	81

4.4.3 Pengaruh Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal.....	83
4.4.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal.....	84
4.5 Persamaan Model Individu di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan	85
BAB V KESIMPULAN	91
5.1 Kesimpulan.....	91
5.2 Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN.....	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Belanja Pemerintah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021	5
Tabel 1.2	Realisasi Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2021 (Rupiah).....	6
Tabel 1.3	Perbandingan Rasio Belanja Modal Antar Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021	7
Tabel 1.4	Luas Wilayah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022	12
Tabel 2.1	Struktur APBD	21
Tabel 4.1	Pembagian Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022	52
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022	53
Tabel 4.3	Nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2022	55
Tabel 4.4	Realisasi Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan (Rupiah)	57
Tabel 4.5	Perkembangan Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan	58
Tabel 4.6	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan (Rupiah).....	60
Tabel 4.7	Perkembangan PAD di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan	61
Tabel 4.8	Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan (Rupiah).....	64
Tabel 4.9	Perkembangan DAU Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan..	65
Tabel 4.10	Luas Wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan	67
Tabel 4.11	Statistik Deskriptif.....	69

Tabel 4.12	Hasil Regresi Data Panel CEM	70
Tabel 4.13	Hasil Regresi Data Panel FEM.....	71
Tabel 4.14	Hasil Uji Chow	71
Tabel 4.15	Hasil Regresi Data Panel REM	72
Tabel 4.16	Hasil Uji Hausman	72
Tabel 4.17	Hasil Uji Multikolinearitas	74
Tabel 4.18	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	75
Tabel 4.19	Output Regresi Data Panel <i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	76
Tabel 4.20	Uji t.....	78
Tabel 4.21	Uji F.....	79
Tabel 4.22	Koefisien Determinasi (R^2).....	79
Tabel 4.23	Koefisien Antar Individual Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009-2022	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2021.....	9
Gambar 1.2	Dana Alokasi Umum (DAU) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2021.....	10
Gambar 2.1	Kurva Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner	18
Gambar 2.2	Kurva Teori menurut Peacock dan Wiseman.....	19
Gambar 2.3	Kerangka Konseptual	40
Gambar 4.1	Peta Administrasi Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.....	52
Gambar 4.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022	54
Gambar 4.3	Hasil Uji Normalitas.....	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Data Asli Regresi Panel Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Luas Wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2022	101
Lampiran 2.	Data Transformasi Logaritma Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Luas Wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2022.....	106
Lampiran 3.	Uji Chow	111
Lampiran 4.	Uji Hausman.....	111
Lampiran 5.	Hasil Regresi <i>Fixed Effect Model</i>	112
Lampiran 6.	Hasil Regresi <i>Fixed Effect Model</i> (FEM) (<i>Pooled Data</i>).....	112

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, agar meminimalisir tingkat pengangguran dan ketimpangan, menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, serta membuka kesempatan kerja yang lebih luas di Indonesia. Negara Indonesia dalam lingkup yang lebih spesifik merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak daerah. Aktivitas-aktivitas perekonomian di daerah memacu perkembangan potensi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, adanya penerapan otonomi daerah di Indonesia, otonomi daerah ini memiliki peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang menjadi tujuan utama Pemerintah Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah di Pemerintahan Negara Indonesia sendiri sudah berlaku sejak tahun 2001, hal ini merupakan usaha pemerintah dalam memperkuat perekonomian di daerah (Sari *et al.*, 2017). Otonomi daerah memberikan kewenangan dan otoritas yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah dalam mengelola sumber daya dan potensi ekonomi di daerah tersebut. Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, diharapkan dapat beroperasi untuk mengelola keuangan secara efektif dan efisien, serta menjunjung tinggi akuntabilitas dan transparansi.

Pelaksanaan otonomi daerah ini bagian dari sistem desentralisasi, sebagai reformasi hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang mana sebelumnya diberlakukan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintahan daerah mendapatkan wewenang yang lebih luas dalam mengelola sumber daya yang tersedia untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkembang (Sugiyanta, 2016). Adapun tujuan otonomi daerah ini untuk meningkatkan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat di daerahnya, Pemerintah Pusat menyadari bahwa Pemerintah Daerah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang masalah-masalah yang ada di daerahnya sendiri, yang mana diharapkan dapat membantu dan mempermudah dalam berbagai penyelenggaraan urusan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 tentang Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengurus dan mengatur urusan dalam pemerintahan daerahnya serta memenuhi kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat di daerah otonom tersebut.

Dalam menjalankan pelaksanaan otonomi daerah, haruslah transparan dan akuntabilitas, sebagai wujud pengelolaan keuangan yang relevan dengan fungsi pemerintah daerah terhadap pemberian pelayanan kepada masyarakat daerah tersebut (Zais, 2016). Penerapan otonomi daerah pada provinsi maupun kabupaten/kota, memberi kebebasan ataupun keleluasaan pada Pemerintah Daerah untuk bisa mengeksplorasi lebih banyak potensi sumber-sumber keuangan pada wilayahnya dan mengalokasikannya ke belanja daerah sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat daerah tersebut. Jika semakin banyak menggali sumber keuangan, maka dapat meningkatkan pendapatan daerah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dan membuat pergerakan pemerintah untuk melakukan pembangunan daerahnya yang direalisasikan dalam pengadaan

fasilitas, infratraktur, dan sarana untuk kepentingan publik (Wertianti & Dwirandra, 2013). Pemerintah Daerah dapat mengatur jalan perekonomian pada daerah tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan rencana keuangan daerah dan telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai badan pengawas serta evaluasi kinerja pemerintah. APBD memiliki tujuan untuk mengatur penerimaan serta pengeluaran daerah selama satu tahun anggaran. Adapun struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diatur di dalam pasal 27 Ayat 1 PP 12 Tahun 2019, meliputi 3 komponen utama yaitu, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Komponen belanja daerah merupakan salah satu komponen yang penting di dalam APBD, klasifikasi belanja daerah ini yaitu terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer atau Bagi Hasil ke Daerah. Peran belanja modal bagi Pemerintah Daerah sangat penting untuk kemajuan daerah tersebut, dengan belanja modal yang ada, maka dapat meningkatkan kualitas infrastruktur atau pelayanan publik dan meningkatkan iklim investasi yang kondusif, gunanya untuk menambah peningkatan pendapatan daerah tersebut (Rahmadewi, 2018).

Belanja pemerintah dalam bentuk belanja modal sering disebut belanja daerah yang merupakan identitas penerimaan daerah (Susetyo *et al.*, 2018). Salah satu tugas Pemerintah Daerah ialah mengalokasikan anggaran dana yang ada pada APBD untuk membeli ataupun menambahkan aset tetap atau aset lain ke daerahnya dan memberikan fasilitas serta pelayanan pada masyarakat daerah tersebut dengan baik. Belanja modal ini merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk pengadaan atau membeli atau pembangunan aset tetap dan aset lainnya, yang berbentuk seperti tanah, jalan, gedung dan bangunan, peralatan dan

mesin, buku perpustakaan, *network* dan *software*, irigasi, dan lainnya. Menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2020, yang mana belanja modal merupakan dana untuk pembelian aset tetap atau aset lainnya yang mempunyai masa atau waktu yang bermanfaat lebih dari satu tahun.

Belanja modal memiliki peranan penting dalam pembangunan daerah terutama meningkatkan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan aset produktif lainnya karena melibatkan pengeluaran untuk investasi jangka panjang. Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi mempunyai banyak kabupaten/kota yang kaya akan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM), provinsi ini memiliki luas wilayah sebesar 91.592,43 kilometer persegi, secara administratif Provinsi Sumatera Selatan mempunyai 13 Kabupaten dan 4 Kota yaitu: 1) Kab. Ogan Komering Ulu (OKU); 2) Kab. Ogan Komering Ilir (OKI); 3) Kab. Muara Enim; 4) Kab. Lahat; 5) Kab. Musi Rawas; 6) Kab. Musi Banyuasin; 7) Kab. OKU Selatan; 8) Kab. OKU Timur; 9) Kab. Ogan Ilir; 10) Kab. Empat Lawang; 11) Kab. Penukal Abab Lematang Ilir; 12) Kab. Musi Rawas Utara; 13) Kab. Banyuasin; 14) Kota Palembang; 15) Kota Prabumulih; 16) Kota Pagaralam; dan 17) Kota Lubuk Linggau.

Tabel 1.1 Data Belanja Pemerintah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

Kab/Kota	Belanja Pemerintah Menurut Kab/Kota (Rupiah)
	Tahun 2021
Ogan Komering Ulu	1.401.617.083.856,18
Ogan Komering Ilir	2.237.401.789.599,43
Muara Enim	2.334.803.457.357,94
Lahat	2.099.279.238.941,08
Musi Rawas	1.876.928.036.553,63
Musi Banyuasin	3.606.253.496.535,70
Banyuasin	2.332.836.297.622,20
OKU Selatan	1.130.554.735.829,31
OKU Timur	1.792.921.826.243,80
Ogan Ilir	1.382.833.989.857,34
Empat Lawang	1.003.277.772.856,22
Penukal Abab Lematang Ilir	1.207.743.952.954,00
Musi Rawas Utara	758.589.323.075,75
Palembang	3.325.234.635.944,89
Prabumulih	949.080.808.160,00
Pagar Alam	734.620.398.644,67
Lubuk Linggau	857.219.839.303,50

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 (diolah)

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Kota Palembang pada tahun 2021 memiliki belanja pemerintah yang paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebesar Rp3.325.234.635.944,89, sedangkan belanja pemerintah yang paling rendah pada kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021 yaitu belanja pemerintah di Kota Pagar Alam hanya sebesar Rp734.620.398.644,67.

Adapun realisasi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan selama periode tahun 2019-2021:

Tabel 1.2 Realisasi Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2021 (Rupiah)

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
Kab. Lahat	396.808.861.446	367.820.849.128	474.177.167.894
Kab. Musi Banyuasin	1.102.419.234.361	790.704.925.339	1.097.177.454.587
Kab. Musi Rawas	430.926.194.698	406.015.937.073	489.600.670.001
Kab. Muara Enim	888.469.027.757	541.986.171.270	431.576.458.255
Kab. Ogan Komering Ilir	626.423.290.261	608.893.907.368	571.443.482.984
Kab. Ogan Komering Ulu	348.992.623.346	247.547.357.226	263.193.344.805
Kota Palembang	1.115.910.029.299	885.864.120.070	798.823.605.176
Kota Prabumulih	311.715.302.708	220.756.462.111	169.883.537.767
Kota Pagar Alam	216.250.532.961	248.938.480.304	180.242.891.924
Kota Lubuk Linggau	254.283.952.721	334.867.453.980	331.394.237.141
Kab. Banyuasin	424.906.574.189	582.776.915.571	444.620.359.692
Kab. Ogan Ilir	323.235.226.236	264.317.729.332	259.280.835.552
Kab. OKU Timur	508.497.584.655	440.579.396.457	464.298.024.786
Kab. OKU Selatan	381.552.391.906	283.802.863.526	229.182.446.083
Kab. Empat Lawang	253.146.607.390	278.168.446.646	376.713.981.327
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	764.119.060.810	275.492.985.288	425.054.064.385
Kab. Musi Rawas Utara	394.412.850.373	267.157.873.825	195.678.959.076

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK, Kemenkeu) (diolah)

Berdasarkan pada Tabel 1.2 realisasi belanja modal tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan sebelum terjadinya masa *pandemic covid-19* pada tahun 2019 yaitu di Kota Palembang, yang mana realisasi belanja modalnya sebesar Rp1.115.910.029.299, sedangkan realisasi belanja modal terendah pada tahun 2019 yaitu di Kota Pagar Alam yang hanya sebesar Rp216.250.532.961.

Pada tahun 2020, realisasi belanja modal tertinggi masih terdapat di Kota Palembang yaitu sebesar Rp885.864.120.070, akan tetapi hal ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 20,6 persen, sedangkan belanja modal terendah pada tahun 2020 yaitu terdapat di Kota Prabumulih yaitu sebesar Rp220.756462.111. Kota Prabumulih sendiri mengalami penurunan realisasi belanja modal dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 29,1 persen.

Setelah terjadinya masa *pandemic covid-19* pada tahun 2021, realisasi belanja modal tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin yaitu sebesar Rp1.097.177.454.587, yang mana setelah terjadinya masa *pandemic covid-19* realisasi belanja modal di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami kenaikan 38,7 persen dari tahun sebelumnya, berbeda dengan Kota Palembang yang mengalami penurunan realisasi belanja modal setelah masa *pandemic covid-19* yaitu sebesar 9,8 persen dari tahun 2020, sedangkan realisasi belanja modal terendah terdapat di Kota Pagar Alam yaitu sebesar Rp180.242.891.924 yang juga mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 27,5 persen.

Tabel 1.3 Perbandingan Rasio Belanja Modal Antar Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Tahun 2021 (%)
Kab. Lahat	22,59
Kab. Musi Banyuasin	30,42
Kab. Musi Rawas	26,09
Kab. Muara Enim	18,48
Kab. Ogan Komering Ilir	25,54
Kab. Ogan Komering Ulu	18,78
Kota Palembang	24,02
Kota Prabumulih	17,90
Kota Pagar Alam	24,54
Kota Lubuk Linggau	38,66
Kab. Banyuasin	19,06
Kab. Ogan Ilir	18,75
Kab. OKU Timur	25,90
Kab. OKU Selatan	20,27
Kab. Empat Lawang	37,55
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	35,19
Kab. Musi Rawas Utara	25,80
Jumlah	429,53
Rata-Rata	25,27

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK, Kemenkeu) (diolah)

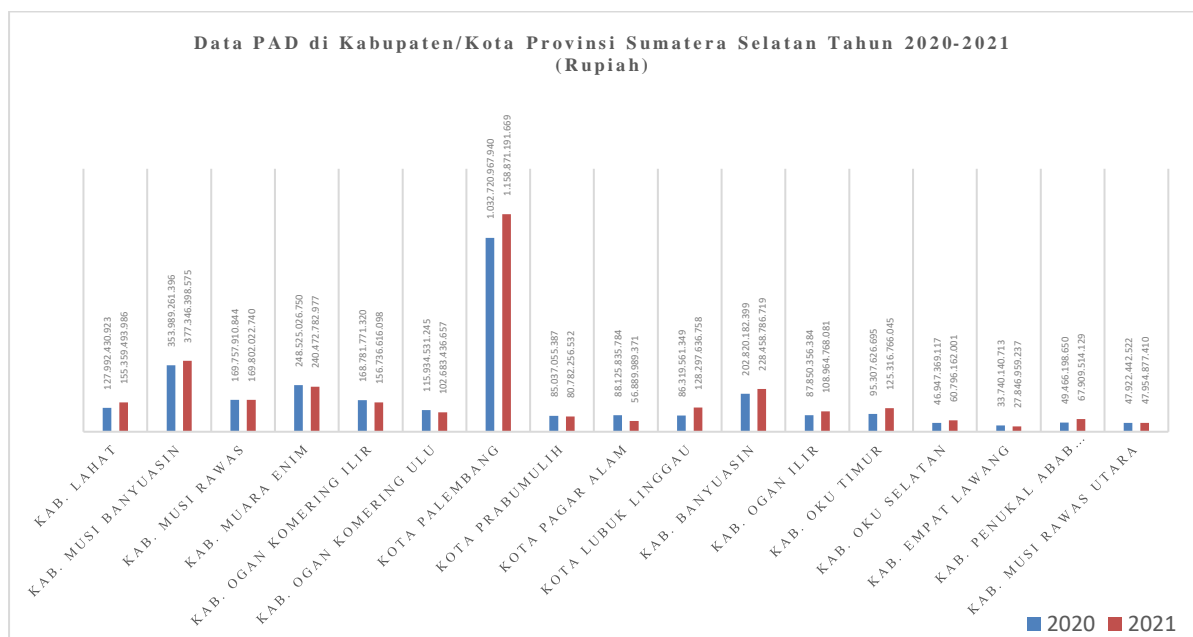
Pada Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa taraf rata-rata rasio belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 yaitu 25,27 persen. Dari rata-rata rasio tersebut hanya 8 kabupaten/kota yang memiliki rasio belanja modal

di atas rata-rata. Selama tahun 2021 ini sisanya terdapat 9 kabupaten/kota yang nilai taraf belanja modalnya di bawah rata-rata rasio diantaranya yaitu di Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota Pagar Alam, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten OKU Selatan. Dalam keadaan ini, artinya dapat diterangkan bahwa terdapat beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang masih menganggarkan belanja modal daerahnya dibawah nilai rata-rata. Realisasi belanja modal yang rendah dapat mengancam infrastruktur yang sudah tersedia menjadi tidak layak dan dapat menghentikan rencana pembuatan proyek-proyek yang baru. Akibatnya, dapat menyebabkan perekonomian di daerah tersebut terhambat, pertumbuhan ekonomi tidak berkembang, dan akan membuat ketergantungan pada APBN dan APBD sebagai penggerak utama dalam ekonomi (Kasdy *et al.*, 2018).

Alokasi dana untuk belanja modal Pemerintah Daerah bersumber dari berbagai pendapatan dan pembiayaan. Pengalokasian dana pada belanja modal ini dipengaruhi oleh penerimaan daerah, pemerintah dapat menaikkan penerimaan daerahnya dengan cara mengelola sumber daya daerah yang ada lalu dimasukkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pendanaan untuk membiayai kegiatan belanja modal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, pendapatan daerah ini ialah seluruh hak daerah, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan sebagian atau seluruh PAD yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber pendapatan lainnya. Tingkat PAD yang tinggi dapat memberikan pemerintah daerah sumber daya finansial yang lebih besar untuk dialokasikan ke belanja modal. Selain itu, Dana Perimbangan terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) sangat penting bagi Pemerintah Daerah, terutama DAU

memiliki andil sebesar 70 persen dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di daerah (Reni & Setiawan, 2019). Semakin tinggi DAU yang diterima oleh Pemerintah Daerah maka akan semakin meningkat pula PDRB pemerintah tersebut (Sari *et al.*, 2016). DAU ini merupakan dana yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang bisa dialokasikan menjadi belanja modal (Rasuli & Diyanto, 2017). Berdasarkan hal tersebut, artinya DAU ialah transfer dana oleh Pemerintah Pusat yang diberi secara rata kepada tiap-tiap daerah ke Pemerintah Daerah, sebagian juga untuk mendukung belanja modal, bertujuan untuk memperkuat keuangan daerah yang memiliki keterbatasan pendapatan asli dan membantu menyeimbangkan kesenjangan pembangunan daerah tersebut.

Gambar 1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2021

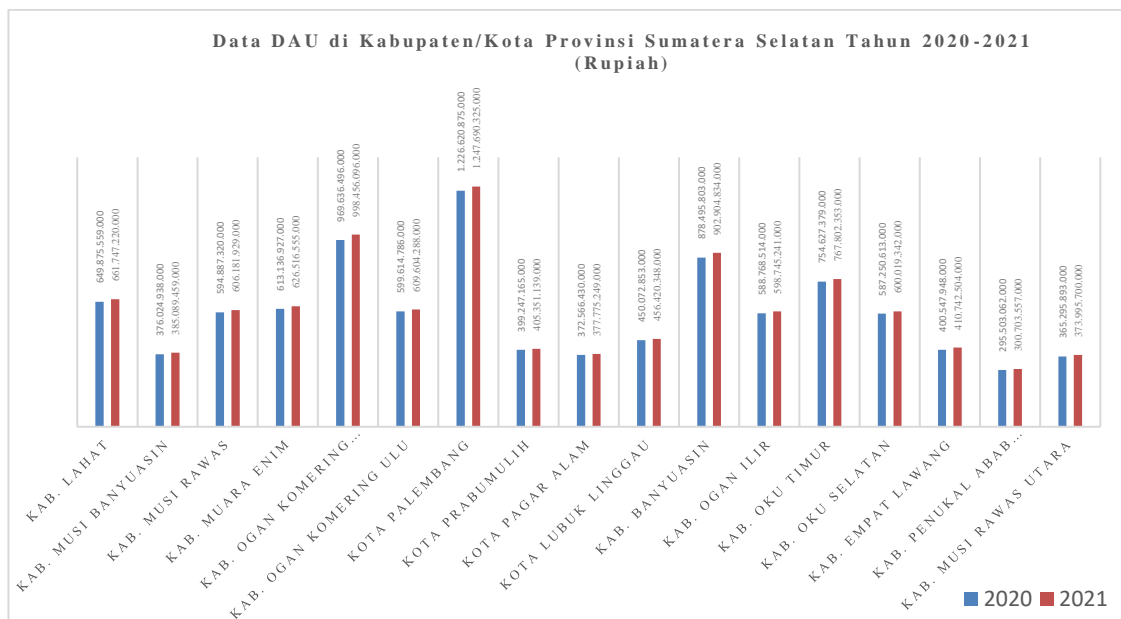


Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJP, Kemenkeu) (diolah)

Dapat dilihat pada Gambar 1.1 jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan meningkat sebesar 8,3 persen dari tahun 2020 ke tahun 2021. Terdapat 7 kabupaten/kota yang mengalami

peningkatan penerimaan PAD. Peningkatan penerimaan PAD paling tinggi terdapat di Kota Palembang yang meningkat sebesar 12,2 persen yaitu dari Rp1.032.720.967.940 menjadi Rp1.158.871.191.669, sedangkan hanya terdapat 6 kabupaten/kota yang mengalami penurunan penerimaan PAD setelah masa *pandemic covid-19* pada tahun 2021 yaitu Kabupaten Muara Enim mengalami penurunan sebesar 3,2 persen, Kabupaten Ogan Komering Ilir turun sebesar 7,13 persen, Kabupaten Ogan Komering Ulu turun sebesar 11,4 persen, Kota Prabumulih turun sebesar 5 persen, Kota Pagar Alam mengalami penurunan sebesar 35,4 persen, dan Kabupaten Empat Lawang turun sebesar 17,4 persen. Penurunan ini terjadi karena adanya penerimaan pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan dan perusahaan daerah, serta lain-lain PAD yang sah menurun.

Gambar 1.2 Dana Alokasi Umum (DAU) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2021



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK, Kemenkeu) (diolah)

Berdasarkan Gambar 1.2 yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan mengalami kenaikan setelah masa *pandemic covid-19* yaitu pada tahun 2021, kenaikan DAU ini sebesar 2,05 persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi DAU paling tinggi dari tahun

2020 ke tahun 2021 yaitu di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mana mengalami peningkatan sebesar 2,97 persen, sedangkan peningkatan DAU paling rendah terdapat di Kota Pagar Alam sebesar 1,39 persen. Di beberapa daerah DAU menjadi sumber penerimaan utama, namun di beberapa daerah lainnya tidak demikian, DAU mengindikasikan peran yang strategis antara APBN dan APBD, oleh sebab itu perlu diikuti tata kelola DAU yang baik agar DAU dalam pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dapat terwujud sekaligus mampu mendorong konvergensi tingkat pelayanan publik dan kesejahteraan antar daerah (Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu).

Selain pendapatan dan pembiayaan, salah satu kebutuhan fiskal dalam DAU ialah luas wilayah, yang juga dapat menjadi faktor dalam belanja modal, karena terdapat hubungan antara ukuran geografis suatu wilayah dengan jumlah belanja modal yang dilakukan wilayah tersebut. Wilayah yang luas cenderung mempunyai lebih banyak lahan yang tersedia untuk mengembangkan dan membangun infrastruktur, serta mempunyai lebih banyak jalan dan jaringan, yang artinya wilayah yang lebih luas memiliki belanja modal yang lebih besar, dengan mengikuti luas daerah tersebut dan sebaliknya.

Tabel 1.4 Luas Wilayah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km²) Tahun 2022
Ogan Komering Ulu	3.774,50
Ogan Komering Ilir	17.071,33
Muara Enim	6.763,91
Lahat	4.333,07
Musi Rawas	6.122,59
Musi Banyuasin	14.550,79
Banyuasin	12.262,76
Ogan Komering Ulu Selatan	3.412,72
Ogan Komering Ulu Timur	4.369,25
Ogan Ilir	2.302,86
Empat Lawang	2.234,10
Pali	1.842,56
Musi Rawas Utara	5.937,80
Palembang	352,51
Prabumulih	447,31
Pagar Alam	625,91
Lubuk Linggau	367,73

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa luas wilayah yang paling luas di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022, ialah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang luasnya sebesar 17.071.133 kilometer persegi, memiliki realisasi belanja modal sebesar Rp584.592.433.352, sedangkan untuk luas wilayah paling sempit adalah Kota Palembang, yaitu hanya sebesar 352.51 kilometer persegi dan memiliki realisasi belanja modal sebesar Rp788.655.516.017. Sebelumnya Kota Prabumulih yang menjadi wilayah paling kecil di Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 251,94 kilometer persegi, tetapi pada tahun 2022 luas wilayahnya yaitu menjadi 447.31 kilometer persegi. Pada nyatanya, Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan untuk daerah-daerah yang mempunyai wilayah yang lebih luas dan mempunyai lahan pertanian yang lebih luas daripada daerah pemerintahannya, membutuhkan

dana yang lebih sedikit dibandingkan dengan daerah yang luas wilayahnya lebih sempit akan tetapi wilayah yang menjadi pusat kota dan pemerintahan membutuhkan adanya belanja modal yang lebih banyak untuk mendanai wilayah tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Juniawan & Suryantini (2018) menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil penelitian juga sejalan dengan Febriana & Praptoyo (2015) yaitu variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal. Akan tetapi, beda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Zais (2017) dan penelitian oleh Maulana, Masitoh, dan Dewi (2020) menunjukkan bahwa variabel dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Mengacu pada uraian latar belakang tersebut, terdapat hasil penelitian yang beragam dan mengingat pentingnya peningkatan infrastruktur serta pelayanan masyarakat pada suatu daerah melalui belanja modal, maka dilakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2022.”

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2012-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal di

Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2012-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian dari penelitian, terdapat manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini yaitu:

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan manfaat dari penelitian ini yaitu:

- a) Bermanfaat sebagai informasi dan referensi untuk menambah ilmu dan wawasan tentang pengembangan ilmu ekonomi, khususnya tentang Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2022.
- b) Bermanfaat untuk mengetahui pengaruh dan perkembangan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2022.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan manfaat dari penelitian ini yaitu:

- a) Bagi Peneliti untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta menambah pemahaman teori mengenai faktor-faktor belanja modal.
- b) Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan teori dalam faktor-faktor belanja modal.
- c) Bagi Pemerintah diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam mengambil keputusan kebijakan-kebijakan untuk pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyatma, Erdi dan Rachmawati M.O. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi. *Dinamika Akuntansi, Keuangan, dan Perbankan*. Vol.4, No.2, 190-205.
- Afkarina, Zia, dan Suwardi. (2017). Pengaruh PAD, DAU, SILPA, dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol.6, No.8, 1-18.
- Antara News. 9 Agustus 2022. “DJPb Ingatkan Pemda Sumsel Serap APBN Respons Ketidakpastian Global”.
<https://www.antaraneews.com/berita/3048465/djpb-ingatkan-pemda-sumsel-serap-apbn-respons-ketidakpastian-global>.
- Anugra, R., Marwa, T., & Imelda, I. (2016). Analisis Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah dengan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol.14, No.1, 31-40.
- Apriliyana, Yosi. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Periode 2015-2019. (*Skripsi Sarjana, IAIN Surakarta*).
- Ardhani, Pungky. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. (*Skripsi Sarjana, Universitas Diponegoro*).
- Astuti, Novita Dwi. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2014. (*Skripsi Sarjana, Universitas Negeri Yogyakarta*).
- Azwar, A. (2016). Peran Alokatif Pemerintah Melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*. Vol. 20, No.2, 149-167.
- Badan Kebijakan Fiskal “Kajian Peningkatan Efektivitas Peranan DAU Dalam Pemerataan Kemampuan Keuangan Antar Daerah”.
<https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2018/07/02/130043146906279-kajian-peningkatan-efektivitas-peranan-dau-dalam-pemerataan-kemampuan-keuangan-antar-daerah>

- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. 2010-2022. "Sumatera Selatan Dalam Angka 2010-2022". bps. <https://sumsel.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. 2013-2022. "Belanja Modal". bps.sumsel.bps.go.id. <https://sumsel.bps.go.id/indicator/13/557/1/realisasi-belanja-pemerintah.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. 2021. "Realisasi Pendapatan Pemerintah".bps.sumsel.bps.go.id. <https://sumsel.bps.go.id/indicator/13/555/1/realisasi-pendapatan-pemerintah.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. 2021. "Realisasi Belanja Pemerintah".bps.sumsel.bps.go.id.<https://sumsel.bps.go.id/indicator/13/557/1/realisasi-belanja-pemerintah.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. 2022. "Luas Wilayah (km²)".bps.sumsel.bps.go.id. <https://sumsel.bps.go.id/indicator/153/201/1/luas-wilayah.html>
- Bank Indonesia. "Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan Mei 2022".bi.bi.go.id. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Documents/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Sumatera-Selatan-Mei-2022.pdf>
- Basuki, A.T., & Yuliadi, I. (2014). *Electronic Data Processing (SPSS 15 dan Eviews 7)*. Danisa Media.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. "Belanja Modal". djpk.kemenkeu.go.id.<https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apakah-yang-dimaksud-dengan-belanja-modal>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. "Laporan Realisasi APBD". djpk.kemenkeu.go.id. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan."Kajian Fiskal Regional". djpb.kemenkeu.go.id.http://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/file_artikel/filepdf/kfr/tw22021/6_Sumatera_Selatan-min.pdf
- Farel, R. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal di Kabupaten Bogor. Signifikan: *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol.4, No.2, 189-210.
- Febriana, I.S. dan Praptoyo, S. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Pada Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*. Vol. 4, No.9, 1-22.
- Foye, V.O. (2014). An Analysis of Macroeconomic Determinants of Public Capital Spending in Nigeria. *Journal of Economics and Sustainable Development*. Vol.5, No.4, 1-12.

- Gagola, L., Sondakh, J., & Warongan, J. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill*. Vol. 8, No.1.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. (Edisi 9. Cetakan ke-9)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamdani, I., Nesta, N. S., Rahmawati, J., & Hidayat, F. (2023). Pengeluaran Pemerintah Untuk Pembangunan Daerah. Wawasan: *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*. Vol.1, No.3, 187-203.
- Handayani, T., Susetyo, D., & Saleh, M. S. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Infrastruktur dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol.15, No.2, 92-100.
- Hermawan, A. D., Made, A., & Yogivaria, D. W. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Se-Malang Raya). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*. Vol.4, No.2, 1-11.
- Junaedy, J. (2015). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah, Terhadap Belanja Modal. *Future: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 2 No. 2, 162-177.
- Jensen, M.C. dan W.H. Meckling. (1976). *Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure*. *Journal of Financial and Economic*. Vol.3, No.4, 305-360.
- Juniawan, M.A. dan Ni Putu Santi Suryantini. (2018). Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen*. Vol.7, No.3, 1255-1281.
- Kasdy, L. M., Nadirsyah, N., & Fahlevi, H. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal dan Implikasinya pada Realisasi Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec)*. Vol.4, No.1, 1-18.

- Kolinug, F. C., Kumenaung, A. G., & Rotinsulu, D. C. (2019). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kota Manado. *Jurnal Pembangunan dan Keuangan Daerah*. Vol.17, No.2, 45049.
- Mangkoesebroto, Guritno. (1997). *Ekonomi Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE.
- Marseno, Bintang dan Erly Mulyani. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah Penduduk, dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. Vol.2, No.4., 3452-3467.
- Maulana, A. Ilham, Endang Masitoh, dan Riana R,Dewi. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi*. Vol.15, No.1. 12-19.
- Maulana, F., & Fadhlia, W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*. Vol.5, No.3, 362-371.
- Mawarni, D., & Abdullah, S. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Aceh). *Jurnal Akuntansi* ISSN, 2302(2013), 0164, 80-90.
- Nahumuri, L. L. (2019). Esensi dan Urgensi Pengeluaran Pemerintah untuk Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*. Vol.4, No.1, 1-12.
- Napitupulu, R.B., Simanjuntak, T.P., Hutabarat, L., Damanik, H., Sirait, R.T.M., Tobing, L., & Ria, C.E. (2021). *Penelitian Bisnis, Teknik dan Analisa dengan SPSS-STATA-Eviews*. 1 ed. Madenatera.
- Nuzana, Merizal dan Ikhsan B.R. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengalokasian Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol.5., No.1.1-22.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permatasari, I., & Mildawati, T. (2016). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, Vol.5, No.1, 1-17.
- Prawira, Bima Adi. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur. (*Skripsi Sarjana, Universitas Jember*).
- Priambudi, W. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013. *Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, Vol 6, No.1, 136-147.
- Putra, Ferdian. (2017). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2014). (*Skripsi Sarjana, Universitas Negeri Padang*).
- Rahmadewi, Diana Endah. (2018). Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Penerimaan Pembiayaan dan Realisasi Belanja Modal Provinsi Bengkulu. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*. Vol.5, No.1, 108-118.
- Rahmawati, H. (2022). Analisis Fungsi Pengeluaran Pemerintah terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur. *Jurnal STEI Ekonomi*. Vol.31, No,2, 77-82.
- Reni, L.M. dan Setiawan, D. (2019). Pengaruh Variabel Kebutuhan Fiskal Terhadap Alokasi DAU pada Daerah Bercirikan Kepulauan. Indonesia Treasury Review: *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*. Vol.4, No.3, 285-303.
- Rochmatullah, M.R., Rudy H., dan Atwal Arifin. (2016). Determinating The Value of Capital Expenditure Allocation in Indonesia Local Government. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol.17, No.2. 152-166.
- Rohmah, N., & Riharjo, I. B. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota Se Privinsi Jawa Timur Tahun 2013–2017). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, Vol. 8, No.6.

- Ryu, Seeun, Yunseng Kim, dan Jiseul Kim. (2022). Determinants of Capital Spending in Local Governments of South Korea. *International Review of Public Administration, Taylor&Francis Journals*. Vol.27, No.4., 344-362.
- Sari Desak Gede Yudi Atika, Putu Kepramareni, dan Ni Luh Gde Novitasari. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Bali. *Jurnal Kumpulan Riset Akuntansi*. Vol.9, No.1, 15-29.
- Sari, L. N., Susetyo, D., & Saleh, M. S. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Kredit Konsumsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2006-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.14, No.1, 1-7.
- Sholikhah, I., & Wahyudin, A. (2014). Analisis Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa. *Accounting Analysis Journal*. Vol.3 No.4, 553-562.
- Sugiyanta. (2016). Analisis Belanja Modal dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya pada Pemerintah pada Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*. Vol.14, No.1, 19-40.
- Sugiyono. (2017). *Statiska untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Susanti, Susi dan Heru Fahlevi. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*. Vol.1, No.1., 183-191.
- Susetyo, D., Zunaidah, Z., Rohima, S., Valeriani, D., & Bashir, A. (2018). Impact of Capital Expenditure and Public Utility Customers to Economic Development of District-City in Sumatra-Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, Vol.8, No.1, 126–135.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Distribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- Vanesha, V.T., Selamat Rahmadi, dan Parmadi. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*. Vol.14, No.1, 27-36.
- Wandira, Arbie Gugus. (2013). Pengaruh PAD, DAU, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Jurnal Analisis Akuntansi*. Vol.2, No.1, 44-49.
- Wertianti I.G.A Gede dan A.A.N.B. Dwirandra. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi pada Belanja Modal dengan PAD dan DAU sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.4, No.3, 567-584.
- Widarjono, Agus. (2009). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*, Edisi Ketiga. Yogyakarta: Ekonesia.
- Yawa, H., & Runtu, T. (2015). Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Modal Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol.15, No.4.
- Zais, Gogor Mustawa. (2017). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Belanja Modal pada Kabupaten atau Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol.2, No.1, 140-147.